

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. H., Karamoy, H., & Mintalangi, S. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 6 No. 1.
- Darussalam dan Danny Septriadi. 2006. Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak. Jakarta: Grasindo
- Devi, S. M., Rahman, A., & Inayah, N. L. (2021). Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. *UBHARA Accounting Journal (UAJ)*, Vol. 1 No. 2
- Devano dan Rahayu, 2006. "Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu". Kencana. Jakarta
- Imon, A. I., Sabijono, H., & Mawikere, L. M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Kadir, A. (2014). *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kenlei, K. K. (2018). *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah*. Universitas Andalas, Padang.
- Kota Padang. 2013. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sekretaris Daerah. Padang.
- Langi, L. T., Saerang, D. P. E., & D.L.Warongan, J. (2018). Analisis Pemungutan dan Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2) Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. Ensiklopedi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Miller, & Oats, L. (2012). *Principle of International taxation*: Bloomsbury Professional.
- Mujiyati, & Aris, M. A. (2011). *Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pamuji, K. (2010). *Implikasi Kebijakan Pendaerahan Pengelolaan PBB UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Ratuela, G. J., Nangoi, G. B., & Sabijono, H. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No. 05.

- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2003). *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widyaningsih., A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Yulistia. (2019). Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Efektifitas Target Penerimaan PBB (studi Kasus Nagari Timbulun Kab. Sijunjung). *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia (JEBI)*, Vol. 14 No.1.

